



Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali

I D. G. M. Radityana¹, I K. Djayastra², A. A. N. Bagus Danendra³, N. Wisnu Murthi^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Universitas Tabanan

Korespondensi Email: siketutdjayatra@gmail.com

Abstract

Poverty is defined as being trapped in a series of difficult situations that make it difficult to survive and meet the general standards of society. During the last decade, poverty has become a serious discussion both nationally and internationally. In the Province of Bali itself, poverty is something that is classified as a relatively classic problem. In general, the poverty rate in Bali Province has fluctuated both in terms of numbers and percentages. Therefore, this study was to analyze the effect of minimum wages, human development identification and open unemployment on the amount of poverty in Bali Province with the vulnerable years used from 2012 to 2021. The data source in this study is secondary data obtained from The Central Bureau of Statistics (BPS) for the Province of Bali and the UNTAB Library. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test method, the coefficient of multiple determination, multiple linear regression, t test and F test. The results of the study show that the minimum wage has a partially significant and negative effect on poverty in the Province of Bali. The Human Development Index has a partial and significant negative effect on poverty in the Province of Bali. Open unemployment has a positive and partially significant effect on poverty in the Province of Bali. Minimum wages, human development index and open unemployment have a positive and real effect simultaneously on poverty in Bali Province

Keywords: Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Kemiskinan, Pengangguran Terbuka

PENDAHULUAN

Kemiskinan didefinisikan sebagai terperangkap dalam serangkaian situasi sulit yang membuatnya sulit untuk bertahan hidup dan memenuhi standar umum masyarakat (Pratiwi, 2022). Selama satu dekade terakhir, kemiskinan telah menjadi topik diskusi di berbagai forum nasional dan internasional. Diperkirakan terdapat beberapa permasalahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kemiskinan dikaitkan dengan banyak perspektif seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurunkan kemiskinan merupakan salah satu indikator suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan inklusif yang diartikan terjadi pemerataan pertumbuhan yang berkeadilan (Murthi et al., 2022).

Menurut Tri, Said, & Sasongko (2022) di Provinsi Bali pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali belum inklusif. Fenomena ini karena Provinsi Bali

memiliki keunikan dalam struktur ekonomi, dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung. Sehingga sangat terdampak pada saat terjadinya pandemi Covid 19 dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pemulihan ekonomi Bali terus menunjukkan penguatan hingga triwulan II 2022. Ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,46% (yoy). Perbaikan sejalan dengan pemulihan kinerja pariwisata yang didukung oleh berlanjutnya relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali terutama bersumber dari kinerja ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga (RT), sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU) terutama didorong oleh peningkatan kinerja LU Akmamin, Transportasi, dan Konstruksi (BI, 2022). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka PDRB berpengaruh positif terhadap impor provinsi Bali khususnya dalam komoditas perdagangan (Marta dkk, 2020); (Marta dkk, 2021). Tetapi Pendapatan Provinsi Bali masih ditopang oleh daya beli masyarakat yang tinggi sehingga sektor perdagangan tumbuh lebih cepat pada saat pandemi covid 19 yang perlahan lahan mulai berakhir. Ini sesuai dengan penelitian dimana perilaku konsumtif masyarakat Bali terhadap suatu produk dagang masih tinggi (Murthi et al., 2015).

Sumber-sumber dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menjadi penentu kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota yang kaya sumber atau potensi ekonomi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota yang tergolong dalam daerah miskin. Misalnya Kabupaten Badung yang memiliki potensi lebih besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata, Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi dalam kegiatan industri kecil, dan Kabupaten Tabanan dalam sektor pertanian. Sementara itu, Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli memiliki sumber atau potensi ekonomi yang relatif terbatas sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonominya. Walaupun Provinsi Bali telah ditunjang pendapatannya oleh beberapa kabupaten yang memiliki berbagai macam potensi, namun Provinsi Bali masih memiliki permasalahan yang sama dan relatif klasik yaitu kemiskinan. Di balik semua itu ternyata Provinsi Bali masih menyisakan rumah tangga miskin di daerahnya.

Secara umum, sejak tahun 2012 hingga 2021 angka kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi baik dari segi jumlah maupun proporsi. Pada tahun 2015, dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan bahan bakar minyak. Sejak tahun 2015, perlahan kemustahilan di Bali membatasi-angsur menurun. Semenjak adanya kasus Covid-19, sampai saat ini berimbas pada terpuruknya

perekonomian Bali. Perkembangan Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai 2021 ditunjukkan grafik 1.1 berikut ini :



Gambar. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2012 – 2021

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2022

Kemiskinan yang terjadi di rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah upah minimum. Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Nasir, 2008). Menurut para ahli ekonomi, peningkatan upah minimum dipercaya meningkatkan standar kehidupan pekerja, mengurangi kemiskinan, mendorong perusahaan lebih efisien, sekaligus menciptakan efek beruntun lewat peningkatan konsumsi ke peluang kerja baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah ketidakseimbangan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak terkait dengan kehadiran ataupun atraksi tertentu. Kebijakan mengenakan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Sejak tahun 2012 sampai 2021 upah minimum yang ditetapkan Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat dilihat kenaikan yang terjadi untuk upah minimum cukup tinggi, rata-rata kenaikan upah minimum dari tahun 2012 sampai 2021 sekitar 9%. Walaupun dalam kurun waktu 2020-2021 masih terdampak pandemi covid 19, Pendapatan juga merupakan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat diluar pendapatan tetapnya yakni seperti bertani maupun beternak menurut Murthi dkk (2018), meskipun tidak dijadikan sebagai usaha pokok secara keseluruhan, tetapi usaha ini cukup berkontribusi untuk meningkatkan . Secara daya beli secara umum.

Selain upah minimum, faktor lain yang mempengaruhi angka kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran dalam kualitas sumber daya manusia untuk melihat tingkat kemiskinan. Menurut Arifin (2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari

harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari keahlian ekonomi terhadap kualitas hidup. Di Provinsi Bali sendiri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,62% sampai tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,69%. Dalam rentan waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 4,07%.

Selain upah minimum, faktor lain yang mempengaruhi angka kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran dalam kualitas sumber daya manusia untuk melihat tingkat kemiskinan. Menurut Arifin (2015), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari keahlian ekonomi terhadap kualitas hidup. Di Provinsi Bali sendiri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,62% sampai tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,69%. Dalam rentan waktu 10 tahun mulai tahun 2012 sampai 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan 4,07%.

Faktor berikutnya yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kemiskinan adalah respons terbuka. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (pekerjaan penuh) dapat diwujudkan. Menurut Sadono Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek pengurangan pendapatan masyarakat, dan akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Dalam penelitian ini respons yang digunakan adalah respons terbuka.

Secara umum, sejak tahun 2012 hingga 2021 angka aksi terbuka di Provinsi Bali mengalami fluktuasi baik dari segi jumlah maupun proporsi. Pengangguran terbuka merupakan orang ataupun masyarakat yang tidak bekerja sama sekali (Amalia, 2012), Pada tahun 2012 angka respons terbuka di Provinsi Bali sebesar 48.230, namun pada tahun-tahun selanjutnya angka tersebut menurun sampai di tahun 2019. Angka respons terbuka kembali naik dan sangat tinggi yaitu di tahun 2020. Pada tahun 2020 ini angka pengangguran terbuka yang tinggi diakibatkan oleh imbas pandemi covid-19, dimana banyak masyarakat yang tidak bekerja akibat imbas/efek yang dirasakan dalam pandemi tersebut. Berbagai sektor usaha di Provinsi Bali terpaksa ditutup akibat pandemi covid-19 tersebut, namun pada tahun 2021, sedikit demi sedikit angka respons kembali menurun. Hubungan dengan hal itu, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu : 1) Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum secara parsial terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali, 2) Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap

Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali, 3) Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. 4) Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Bali dan objek dari penelitian ini adalah harga minimum, indeks pembangunan, respons terbuka dan kemiskinan di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah maka dari itu seharusnya kadar kemiskinan bisa ditekan dengan meningkatkan beberapa faktor seperti upah minimum, kemudian indeks pembangunan manusia. Selain itu faktor lain yang perlu dimaksimalkan adalah menekan pertumbuhannya adalah respons terbuka. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Bali dan didukung peningkatan di beberapa sektor, niscaya tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dapat menurun. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali seperti Upah Minimum di Provinsi Bali tahun 2012-2021 (X_1), Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali tahun 2012-2021 (X_2), dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali tahun 2012-2021 (X_3), jumlah kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2012-2021 (Y).

PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Tahun 2012 - 2021 maka diperoleh data mengenai Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

1. Upah Minimum Provinsi Bali

Sejak tahun 2012 sampai 2021 upah minimum yang ditetapkan Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2012, upah minimum di Provinsi Bali sebesar 967.500 ribu rupiah kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 18% dengan nilai sebesar 1.181.000 ribu rupiah. Pada tahun 2014 kenaikan upah minimum sebesar 23% dengan angka 1.542.600 ribu rupiah.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2012, IPM di Provinsi Bali berada pada angka 71.62% sampai pada tahun 2021 sebesar 75.69%. Rata-rata peningkatan yang terjadi mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,55%.

3. Jumlah Pengangguran Terbuka

Sejak tahun 2012 sampai 2021 Pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Bali mengalami fluktuasi, pada tahun 2012, Pengangguran terbuka di Provinsi Bali berada pada angka 48.230 ribu orang kemudian menurun di tahun 2013 sebesar 41.820 ribu orang, kemudian naik kembali di tahun 2014 sampai tahun 2015. Di tahun 2017 sampai 2018 jumlah perlawanan perlawanan-angsur menurun. Pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 144.500 ribu orang. Tingginya angka tersebut dikarenakan efek dari pandemi covid19, dimana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

4. Jumlah Kemiskinan

Sejak tahun 2012 sampai 2021 angka kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi baik dari segi jumlah maupun proporsi. Pada tahun 2015, dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan bahan bakar minyak. Sejak tahun 2015, perlahan kemustahilan di Bali membatasi-angsur menurun. Semenjak adanya kasus Covid-19 sampai saat ini berimbas pada terpuruknya perekonomian Bali. Perkembangan jumlah reruntuhan di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai 2021.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan aplikasi *SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 21.0 for windows* maka hasil analisis yang diperoleh seperti yang diuraikan pada Tabel 1 berikut:

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka persamaan regresi linear berganda adalah:

$Y = 634.424,574 - 0,055 X_1 - 7.340,118 X_2 + 0,302 X_3$ dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 634.424,574 artinya rata-rata jumlah kemiskinan di Provinsi Bali adalah 634.424,574 orang dengan asumsi perubahan variabel Upah minimum (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), Pengangguran Terbuka (X_3) sama dengan nol.
2. Koefisien regresi Upah Minimum (X_1) sebesar -0,055 memiliki arti bahwa peningkatan di atas Upah Minimum (X_1) sebesar Rp.1 maka jumlah kemiskinan di Provinsi Bali akan menurun sebesar 0,055 dengan asumsi perubahan variabel konstan lainnya.
3. Koefisien regresi Indeks Pembangunan Manusia (X_2) sebesar -7.340,118 memiliki arti bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali menurun sebesar 7.340,118 dengan asumsi perubahan variabel lainnya konstan.
4. Koefisien regresi Pengangguran Terbuka (X_3) sebesar 0,302 memiliki arti bahwa peningkatan atas respons terbuka (X_3) sebesar 1 orang akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,302 dengan asumsi perubahan variabel lainnya konstan.

Tabel 1. Analisis Uji Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien regresi	t	Sig
Upah Minimum (X_1)	-0,055	-5,317	0,002
IPM (X_2)	-7340,118	-2,541	0,044
Pengangguran terbuka (X_3)	0,302	3,639	0,011
Konstanta	634424,574		
Koefisien determinasi (R^2)	0,891		
F hitung	16,430		
Signifikasi	0,003		

Sumber:SPSS

Uji Parsial (Uji T) Dan Uji F

1. Uji t (Parsial) untuk upah minimum

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai t statistik sebesar -5,317 dan signifikasinya adalah sebesar 0,002. Angka-angka ini memberikan arti bahwa ada pengaruh negatif dan nyata antara membayar minimum terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, karena t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-5.317 < -1.943$. Selain itu tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditulis jika H_0 ditolak dan H_1 diterima

2. Uji t (Parsial) untuk indeks pembangunan manusia

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai t statistik sebesar -2,541 dan signifikasinya adalah sebesar 0,044. Angka-angka ini memberikan arti bahwa ada pengaruh negatif dan nyata antara indeks pembangunan manusia terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, karena t hitung lebih kecil dari t tabel atau $-2.541 < -1.943$. Selain itu tingkat signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima

3. Uji t (Parsial) untuk reaksi terbuka Berdasarkan tabel 4.9

Diketahui bahwa nilai t statistik sebesar 3,639 dan signifikasinya adalah sebesar 0,011. Angka-angka ini memberikan arti bahwa ada pengaruh positif dan nyata antara respons terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, karena t hitung lebih besar dari t tabel atau $3.639 > 1.943$. Selain itu tingkat signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4. Uji F (*uji variance*)

Digunakan untuk memperkuat nilai R^2 , yang mana dari hasil perhitungan F hitung diperoleh sebesar $16,430 > 4,76$ dan signifikansi lebih kecil dari pada 5% yaitu 0,003 atau $0,003 < 0,05$. Hipotesis yang ditampilkan dalam penelitian ini terbukti benar dengan menyatakan variabel upah minimum, indeks pembangunan manusia dan aktivasi terbuka berpengaruh positif dan nyata secara simultan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali.

Koefisien determinasi

Sesuai hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien korelasi (R^2) sebesar 0,891 hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dengan kontribusi sebesar 89,1 persen dari upah minimum, indeks pembangunan manusia dan respons terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Sedangkan sisa 10,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Upah minimum berpengaruh negatif dan nyata secara signifikan terhadap reruntuhan di Provinsi Bali. 2) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan nyata secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Bali., 3) Pengangguran terbuka berpengaruh positif dan nyata secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 4) Upah minimum, indeks pembangunan manusia dan respons terbuka berpengaruh positif dan nyata secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Saran dari penelitian ini yakni a. Untuk variabel upah minimum disarankan diperlukan peran serta pemerintah

dalam memperhatikan besaran upah minimum yang ditetapkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Dalam menetapkan upah minimum, sebaiknya tidak terlalu rendah yang akan berdampak pada pekerja dan tidak terlalu tinggi yang akan berdampak pada pengusaha. B. Untuk variabel indeks pembangunan manusia disarankan : kepada pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dengan upaya meningkatkan aspek-aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. C. Untuk variabel respons terbuka : bagi pemerintah Provinsi Bali, hendaknya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dengan membuka lapangan pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga jumlah pengangguran terbuka semakin berkurang maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, d. diperlukan adanya sinkronisasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam program-program pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah. Perlu dibentuk tim khusus/tim koordinasi program pemerintah provinsi dan program pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M.Y, 2015, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022. *Data Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Kemiskinan*. Bali
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, 02(03), 85.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *jurnal ekonomi*.
- Diah Retnowati, D. (2016). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jpfibunsoed (Jurnal Dan Prosing Universitas Jendral Soedirman)*, 6(1), 608–618.
- Gani, Djupiansyah. 2017. Analisis Pengaruh Upah, Lama Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Eksekutif*. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. “Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Handayani. (2016). Pengaruh Jumlah Unit Usaha Dan Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2001-2015. *Skripsi* UIN ALAUDDIN Makassar.
- Latuconsina, Z.M. (2017). Analisis-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Panel Regresi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perdesaan*.

- Marisca, Haryadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi. *Jurnal Prespektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. Jambi.
- Marta, I. N.G., Murthi, N. W., dan Terimajaya, I.W. (2021). Analisis Jangka Panjang Keterbukaan impor Perekonomian Bali, *Majalah ilmiah Untab*, 18(2), 261-266.
- Mudrajad Kuncoro, 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
- Murthi, N. W., Made K, Sri B, Ida B. P, (2015). Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. *EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4 No. 12, pp: 10011048.
- Murthi, N.W., Wiratmaja, I.B.N., dan Aryawan, I.M.G. (2018). Pengaruh modal, tenaga kerja dan lama usaha terhadap pendapatan peternak ayam petelur di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, *Majalah ilmiah Untab*, 15(2), 172-177.
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUMDes performance on inclusive growth in coastal village, Badung Regency. *International Journal of Health Sciences*, 6(S5), 8879–8890. [10.53730/ijhs.v6nS5.11797](https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.11797).
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. (2022). The Effect of Several Factors on Inclusive Growth in the Coastal Village–Badung. *Central European Management Journal*, 30(4), 1371–1383. [10.57030/23364890.cemj.30.4.138](https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.138).
- Priseptian, L., & Primandhana, W.P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Jurnal FORUM EKONOMI*.
- Salsabilla, A., Juliannisa, I.A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis faktor- faktor kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal IKRAITH-EKONOMITRIKA*, 5(2), 96–105.
- Tri, Resky, Said, Nur, & Sasongko, Gatot. (2022). *Media Trend*. 17(2), 343–356.
- Pratiwi, 2022. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Bali Tahun 2011-2020”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*.